



DOKUMEN

RENCANA KINERJA

TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	2
BAB III PENUTUP.....	5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2025) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan merupakan pelaksanaan dari pada Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perancang, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tahun 2025 merupakan turunan penetapan rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tahun 2020 - 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Di dalam Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan meguraikan visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arahan kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode pelaksanaan Tahun 2025.

Akhirnya saya mengucapkan terimah kasih dan penghargaan yang setingginya-

tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tahun 2025.

Semoga Tuhan Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Medan, Februari 2024

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan



BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19691119 199803 1 003

A. LATAR BELAKANG

Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan dinamika hukum dan masyarakat yang semakin dinamis, kompleks dan didukung keterbukaan komunikasi dan informasi, tantangan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah untuk lebih berperan aktif dan menunjukkan peran dirinya di masyarakat serta dituntut kepeloporan dalam perubahan-perubahan yang cerdas, inovatif serta bermartabat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi dirinya pada sektor yang sangat berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan pembaharuan dan perbaikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dan juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan akan suatu media perencanaan yang dapat mengikat suatu instansi pemerintah agar mampu mewujudkan suatu kinerja yang telah disepakati dengan menggunakan sumber daya yang dialokasikan.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan mempunyai maksud dan tujuan untuk menjadi dasar dalam menetapkan kinerja tahunan sehingga dapat menciptakan tolak ukur kinerja sebagai alat untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan juga untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Strategis 2020 - 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai **Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM)** yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi Jilid II Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya (*blue print*).

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini sebagai tonggak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan sebagai upaya perbaikan secara kontinue sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
TAHUN 2022, 2023 dan 2024

1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.*

Indikator Kinerja	Target			
	2022	2023	2024	2025
1. Persentase perkara pada PTUN Medan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2. Persentase perkara pada PTUN Medan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	25%	25%	25%	25%
3. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap layanan Peradilan pada PTUN Medan	100%	90%	95%	95%

2. Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Indikator Kinerja	Target			
	2022	2023	2024	2025
1. Persentase Salinan Putusan atas Perkara pada PTUN Medan yang disampaikan kepada para Pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%

3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.*

Indikator Kinerja	Target			
	2022	2023	2024	2025
1. Persentase Perkara Prodeo pada PTUN Medan yang diselesaikan	0%	100%	100%	100%
2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) PTUN Medan.	100%	100%	100%	100%

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target			
	2022	2023	2024	2025
1. Persentase Putusan Perkara Produk Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tahun 2025 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2023 terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

Belum optimalnya beberapa Standar Kinerja pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas pada bidang keahlian tertentu, seperti keahlian pada bidang analisa dan evaluasi kegiatan, menjadi pemicu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan lembaga peradilan.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan dalam penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tahun 2023, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

RINCIAN MATRIKS RENCANA KINERJA UTAMA TAHUN 2025

No.	Sasaran		Target	Strategis		Target	Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja		Program	Kegiatan		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa Perkara yang diselesaikan	100 %	Presentase sisa Perkara yang diselesaikan	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang sederhana, transparan, dan akuntabel dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Presentase sisa Perkara yang diselesaikan	Rp. 67.510.000,-
		b. Presentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu		Persentase perkara yang di selesaikan tepat waktu	
		c. Presentase Penurunan Perkara	100 %	Persentase penurunan sisa perkara		Persentase Penurunan Sisa Perkara	
		d. Presentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi PK	50 % 20 % 70 %	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding, Kasasi, PK	
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		Index responded pencari keadilan yang puas terhadap layanan pradialian	
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Presentase Salinan Putusan yang diterima oleh Para Pihak tepat waktu	100 %	Persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Persentase Salinan putusan yang di terima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b) Presentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap		Persentasi berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap	

		c) Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengheta pemilu) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus)	100 %	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengheta pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus)			100 %	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin danTerpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang di selesaikan	100 %	Persentase perkaraProdeo yang diselesaikan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui PembahasanBiaya Perkara (Penyelesaian Perkara Prodeo)		50 %	Rp. 510.000,-
		b. Presentase Pencari KeadilanGolongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100 %	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum diLingkungan Peradilan TUN		100 %	Rp. 55.000.000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Presentase Putusan PerkaraTUN yang di tindak lanjuti	100 %	Persentase PutusanPerkara TUN yangdi tindaklanjuti	Terselenggaranya Penyelesaian Perkarayang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan PeradilanMiliter dan Tata Usaha Negara (TUN)		100 %	
5.	Meningkatkan Manajemen dan Administrasi Pengadilan	a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Negara dan Sarana/ Prasarana (Aset) b. Meningkatkan Kualitas SDM	100%	Persentase Penyerapan Anggaran dan Keuangan Negara serta SDM berkualitas	Terselenggaranya Administrasi Peradilan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)		100%	Rp. 12.645.493.000